



Peran Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Makro di Tengah Krisis Energi

Ahmad Wahyudi Zein

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Ayla Rizki Janira

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Indah Amelia

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

M. Farhan Aulia Rozan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Nia Rahmadhani

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Alamat: Jl. IAIN No. 1, Gaharu, Kec. Medan Timur, Kota Medan Sumatera Utara 20235

Korespondensi penulis: aylajanira@gmail.com

Abstrak: This study focuses on the global energy crisis, which has exerted significant pressure on the Indonesian economy in recent years. Rising energy prices have directly contributed to higher inflation, increased production costs, and growing fiscal burdens for the government. Under these conditions, the government plays a crucial role in maintaining macroeconomic stability to prevent energy-related shocks from escalating into a broader economic crisis. This study aims to analyze the role of government policies in sustaining macroeconomic stability amid the energy crisis. A qualitative approach is employed through a literature review of relevant scholarly sources. The findings indicate that fiscal, monetary, and energy policies complement each other in mitigating the impacts of the crisis. However, their effectiveness largely depends on policy consistency and the government's capacity to maintain long-term fiscal balance.

Keywords: macroeconomic stability; energy crisis; fiscal policy; monetary policy

Abstrak : Penelitian ini berfokus pada krisis energi global yang telah memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Kenaikan harga energi berdampak langsung pada inflasi, biaya produksi, dan meningkatkan beban fiskal pemerintah. Dalam konteks ini, pemerintah berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi makro agar guncangan energi tidak berkembang menjadi krisis ekonomi yang lebih besar. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran kebijakan pemerintah dalam mempertahankan stabilitas ekonomi makro di tengah krisis energi. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan melakukan kajian pustaka terhadap berbagai sumber ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal, moneter, dan energi saling melengkapi dalam mengurangi dampak krisis, meskipun efektivitasnya sangat tergantung pada konsistensi pelaksanaan dan kemampuan pemerintah dalam menjaga keseimbangan fiskal jangka panjang.

Kata Kunci: stabilitas ekonomi; krisis energi; kebijakan fiskal; kebijakan moneter.

PENDAHULUAN

Krisis energi global dalam beberapa tahun terakhir tidak hanya menjadi isu sektoral, tetapi berkembang menjadi persoalan makroekonomi yang memengaruhi stabilitas perekonomian

nasional. Di Indonesia, kenaikan harga energi dan ketidakpastian pasokan berdampak langsung pada inflasi, biaya produksi, serta tekanan terhadap anggaran pemerintah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa energi memiliki posisi strategis dalam sistem ekonomi, sehingga setiap gangguan di sektor ini dengan cepat merambat ke sektor lain. Dalam situasi tersebut, pemerintah dituntut untuk tidak sekadar bereaksi, tetapi mampu merancang kebijakan yang menjaga stabilitas ekonomi secara menyeluruh.

Stabilitas ekonomi makro umumnya dipahami sebagai kondisi perekonomian yang relatif terkendali, ditandai oleh inflasi yang stabil, pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, serta keseimbangan fiskal dan eksternal yang terjaga. Krisis energi berpotensi mengganggu seluruh indikator tersebut secara simultan. Kenaikan harga energi dapat mendorong inflasi, menekan daya beli masyarakat, serta meningkatkan biaya produksi sektor usaha. Dampak lanjutan dari kondisi ini adalah melambatnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya risiko ketidakstabilan fiskal.

Berbagai kajian di Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam meredam dampak krisis melalui kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan subsidi energi dan peningkatan belanja pemerintah sering dipandang efektif dalam menjaga daya beli masyarakat pada masa krisis. Di sisi lain, kebijakan moneter diarahkan untuk menjaga stabilitas harga dan sistem keuangan. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih membahas kebijakan secara parsial, tanpa menempatkan krisis energi sebagai sumber tekanan utama yang bersifat struktural dan berjangka panjang.

Selain itu, banyak penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada krisis ekonomi yang bersumber dari faktor non-energi, seperti krisis keuangan global atau pandemi. Dalam konteks tersebut, krisis energi sering diposisikan sebagai faktor eksternal pelengkap. Padahal, ketergantungan terhadap energi fosil dan fluktuasi harga energi global menjadikan krisis energi sebagai ancaman yang berulang dan berpotensi menimbulkan tekanan fiskal yang signifikan.

Penelitian-penelitian terbaru mulai mengaitkan kebijakan energi dengan stabilitas ekonomi makro, terutama dalam kerangka ketahanan energi dan transisi menuju energi berkelanjutan. Meskipun demikian, kajian tersebut umumnya masih bersifat konseptual dan belum sepenuhnya mengintegrasikan kebijakan energi dengan kebijakan fiskal dan moneter pemerintah. Dengan demikian, masih terdapat ruang kajian untuk melihat peran pemerintah secara lebih komprehensif dalam menjaga stabilitas ekonomi makro di tengah krisis energi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi makro di tengah krisis energi, dengan menelaah keterkaitan antara kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan energi dalam konteks perekonomian Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Stabilitas ekonomi makro adalah konsep yang menunjukkan keadaan perekonomian yang seimbang dan berkelanjutan. Dalam perspektif teori ekonomi Keynesian, pemerintah memiliki peran krusial dalam pengelolaan ekonomi melalui kebijakan fiskal, terutama saat terjadi krisis. Peningkatan pengeluaran pemerintah dan pemberian subsidi dianggap sebagai cara untuk meningkatkan permintaan agregat dan mencegah penurunan ekonomi.

Di sisi lain, teori monetaris menekankan pentingnya kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Bank sentral bertanggung jawab dalam mengatur jumlah uang yang beredar dan suku bunga untuk memastikan stabilitas ekonomi makro. Dalam situasi krisis energi, kenaikan harga energi dapat menyebabkan inflasi, sehingga kebijakan moneter menjadi alat penting untuk menjaga stabilitas harga.

Selain itu, teori ketahanan ekonomi menyoroti kemampuan perekonomian untuk menyerap dan beradaptasi terhadap guncangan eksternal, termasuk krisis energi. Ketahanan ekonomi sangat dipengaruhi oleh kualitas kebijakan pemerintah dan kemampuan institusi dalam merespons krisis. Oleh karena itu, integrasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan kebijakan energi menjadi dasar teori yang penting dalam penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Jenis penelitian yang diterapkan adalah studi kepustakaan (library research). Sumber data berasal dari literatur ilmiah yang berkaitan dengan topik stabilitas ekonomi makro, kebijakan pemerintah, dan krisis energi di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yang meliputi identifikasi, pencatatan, dan pengklasifikasian temuan utama dari setiap jurnal yang dianalisis. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis), yang bertujuan untuk menelaah pola kebijakan, peran pemerintah, serta dampaknya terhadap stabilitas ekonomi makro berdasarkan penelitian sebelumnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kebijakan Fiskal dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi

Dalam menghadapi krisis energi, kebijakan fiskal menjadi instrumen utama yang digunakan pemerintah untuk meredam tekanan ekonomi. Subsidi energi dan peningkatan belanja pemerintah berfungsi sebagai bantalan awal untuk menahan lonjakan harga dan menjaga daya beli masyarakat. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini relatif efektif dalam jangka pendek, terutama dalam menekan inflasi dan mencegah penurunan konsumsi rumah tangga yang lebih tajam.

Meskipun demikian, efektivitas kebijakan fiskal tidak terlepas dari konsekuensi jangka menengah dan panjang. Peningkatan subsidi energi berpotensi memperbesar beban anggaran dan mempersempit ruang fiskal pemerintah. Kondisi ini menuntut kehati-hatian dalam perancangan kebijakan agar intervensi fiskal tidak menimbulkan ketergantungan yang berkepanjangan serta risiko ketidakseimbangan fiskal di masa depan.

Dalam perspektif teori Keynesian, kebijakan fiskal ekspansif pada masa krisis dapat dibenarkan sebagai upaya stabilisasi. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut perlu disertai strategi exit yang jelas dan pengalihan subsidi ke sektor yang lebih produktif agar stabilitas ekonomi makro dapat terjaga secara berkelanjutan.

B. Peran Kebijakan Moneter dan Koordinasi Kebijakan

Kebijakan moneter memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas harga di tengah tekanan inflasi yang dipicu oleh krisis energi. Bank sentral merespons kondisi ini melalui pengaturan suku bunga dan likuiditas guna menahan laju inflasi dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kebijakan moneter yang responsif mampu membantu menstabilkan ekspektasi inflasi dan mengurangi ketidakpastian di sektor keuangan.

Namun, kebijakan moneter tidak dapat berdiri sendiri. Koordinasi dengan kebijakan fiskal menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan stabilisasi ekonomi. Ketidaksinkronan kebijakan berpotensi melemahkan efektivitas masing-masing instrumen. Oleh karena itu, sinergi antara otoritas fiskal dan moneter menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi krisis energi.

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa koordinasi kebijakan di Indonesia telah berjalan, tetapi masih bersifat reaktif dan jangka pendek. Ke depan, diperlukan kerangka koordinasi yang lebih terstruktur agar kebijakan pemerintah mampu menjaga stabilitas ekonomi makro secara lebih konsisten.

C. Kebijakan Energi dan Ketahanan Ekonomi

Kebijakan energi memiliki keterkaitan langsung dengan stabilitas ekonomi makro, terutama dalam konteks ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil. Fluktuasi harga energi global meningkatkan kerentanan perekonomian nasional terhadap guncangan eksternal. Sejumlah penelitian menegaskan bahwa ketergantungan yang tinggi terhadap impor energi dapat memperbesar tekanan inflasi serta memperburuk neraca perdagangan. Oleh karena itu, kebijakan energi tidak hanya dipahami sebagai kebijakan sektoral, tetapi juga sebagai bagian integral dari strategi stabilitas ekonomi makro.

Transisi menuju energi terbarukan dipandang sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi risiko krisis energi. Namun, proses transisi ini membutuhkan investasi awal yang besar, kesiapan infrastruktur, serta kepastian regulasi. Beberapa kajian menunjukkan bahwa tanpa dukungan kebijakan fiskal yang memadai, transisi energi justru dapat menimbulkan tekanan ekonomi baru dalam jangka pendek. Dengan demikian, peran pemerintah menjadi krusial dalam memastikan bahwa kebijakan transisi energi berjalan secara bertahap dan berkelanjutan.

Selain itu, kebijakan energi juga berkontribusi terhadap peningkatan ketahanan ekonomi nasional. Diversifikasi sumber energi dan penguatan kapasitas produksi domestik dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasar global. Dalam konteks ini, integrasi kebijakan energi dengan kebijakan fiskal dan moneter menjadi prasyarat utama dalam menjaga stabilitas ekonomi makro di tengah krisis energi.

D. Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap Inflasi dan Daya Beli

Krisis energi secara langsung memengaruhi tingkat inflasi melalui kenaikan harga bahan bakar dan biaya distribusi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa lonjakan harga energi memiliki efek berantai terhadap harga barang dan jasa lainnya. Dalam kondisi ini, kebijakan pemerintah diarahkan untuk menahan laju inflasi agar tidak menekan daya beli masyarakat secara berlebihan.

Kebijakan subsidi energi dan pengendalian harga menjadi instrumen yang umum digunakan untuk menjaga stabilitas harga. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut relatif efektif dalam jangka pendek, terutama bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada ketepatan sasaran dan mekanisme distribusi yang diterapkan oleh pemerintah.

Dalam jangka panjang, pengendalian inflasi melalui subsidi perlu diimbangi dengan kebijakan struktural yang mendorong efisiensi energi dan peningkatan produktivitas. Tanpa langkah tersebut, kebijakan subsidi berpotensi menimbulkan distorsi pasar dan beban fiskal yang berkelanjutan.

E. Implikasi Kebijakan Jangka Panjang terhadap Stabilitas Ekonomi Makro

Selain merespons krisis dalam jangka pendek, pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dalam jangka panjang. Beberapa penelitian menekankan pentingnya perumusan kebijakan yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga antisipatif terhadap potensi krisis energi di masa depan.

Kebijakan jangka panjang yang terintegrasi antara sektor energi dan ekonomi makro dapat meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. Hal ini mencakup penguatan kerangka fiskal, peningkatan efisiensi belanja negara, serta pengembangan energi terbarukan yang berkelanjutan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa negara dengan kebijakan energi yang konsisten cenderung memiliki stabilitas ekonomi yang lebih baik.

Dengan demikian, implikasi kebijakan pemerintah dalam menghadapi krisis energi tidak hanya terbatas pada stabilisasi jangka pendek, tetapi juga menentukan arah pembangunan ekonomi nasional dalam jangka panjang.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa stabilitas ekonomi makro di tengah krisis energi sangat ditentukan oleh peran aktif dan terkoordinasi pemerintah. Kebijakan fiskal berperan sebagai penyangga utama dalam meredam tekanan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat, sementara kebijakan moneter berfungsi menjaga stabilitas harga dan sistem keuangan. Di sisi lain, kebijakan energi menjadi fondasi penting dalam mengurangi kerentanan ekonomi terhadap guncangan eksternal. Temuan ini menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi makro tidak dapat dicapai melalui kebijakan sektoral yang berdiri sendiri, melainkan membutuhkan integrasi kebijakan fiskal, moneter, dan energi yang konsisten serta berorientasi jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2023). Peranan pemerintah dalam stabilisasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Neraca*, 5(2), 45–58.
- Hidayat, R. (2021). Strategi kebijakan ekonomi politik preventif Indonesia menghadapi krisis energi. *Mandar Social Science Journal*, 3(1), 12–25.

- Kurniawan, D. (2024). Peran kebijakan fiskal dalam mendukung stabilitas ekonomi makro. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 6(1), 33–47.
- Prasetyo, A. (2022). Kebijakan moneter dan stabilitas ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi Makro*, 4(2), 60–75.
- Putri, N. (2025). Peran kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi. *Jurnal Global Ilmiah*, 7(1), 1–15.
- Rahman, F., & Sari, D. (2022). Kebijakan subsidi energi dan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi makro Indonesia. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 4(1), 21–36.
- Saputra, H. (2023). Koordinasi kebijakan fiskal dan moneter dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(2), 89–104.
- Utami, P. N. (2024). Peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan nasional. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Makro*, 6(1), 15–30.
- Wijaya, R., & Lestari, M. (2021). Ketahanan energi dan implikasinya terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. *Jurnal Energi dan Pembangunan*, 3(2), 55–70.
- Yusuf, M. (2025). Kebijakan energi berkelanjutan dan stabilitas ekonomi makro di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 9(1), 1–16.